

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah menjadi hal yang fundamental sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan lokal yang merupakan kunci anggaran dalam membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah pasca reformasi dan diterapkannya otonomi daerah serta desentralisasi fiskal dengan harapan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya dapat ditingkatkan dengan adanya keleluasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin (Sun'an & Senuk, 2015).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara administratif saat ini terdiri dari 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota. Sebagai salah satu daerah otonom yang patuh terhadap konsep otonomi dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah di Jawa Barat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Menurut data BPS Jawa Barat tahun 2016-2019, kontribusi PAD terhadap TPD di Provinsi Jawa Barat memiliki nilai rata-rata kontribusi per tahun yaitu

sebesar Rp17 triliun atau berkontribusi 64% dari TPD. Jumlah ini lebih besar dari kontribusi dana perimbangan daerah di periode yang sama dengan rata-rata hanya sebesar Rp10 triliun atau berkontribusi 36 % dari TPD.

Berikut adalah rincian penerimaan daerah di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2019 berdasarkan sumbernya:

Tabel 1.1
Total Penerimaan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan sumbernya
(Dalam Jutaan Ruupiah)

Tahun	Total Penerimaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2016	27.694.035	17.042.895	10.622.671	28.469
2017	24.054.880	17.102.520	6.940.686	11.674
2018	33.919.022	19.642.915	14.208.000	68.106
2019	36.037.895	21.244.266	14.715.372	78.256

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah penulis)

Kemampuan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk cukup baik dimana kontribusi PAD Provinsi Jawa Barat terhadap TPD-nya selalu lebih besar daripada kontribusi Dana Perimbangannya. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik dengan tidak bergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

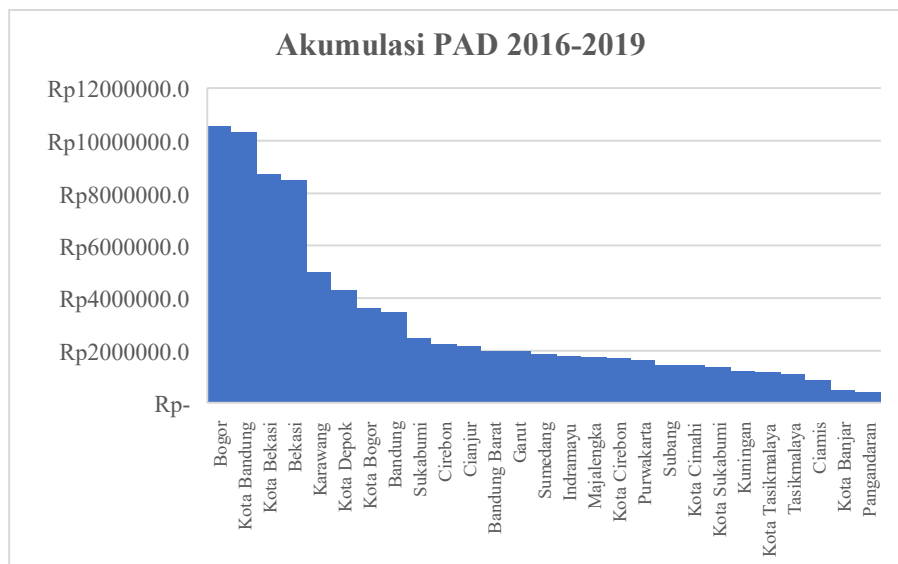
Namun, kondisi ini tidak serta merta membuat kondisi keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan yang serupa. Berdasarkan sumber yang sama yaitu BPS Jawa Barat, berikut adalah rincian penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2019 berdasarkan sumbernya:

Tabel 1.2
Total Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat berdasarkan sumbernya
 (Dalam Jutaan Ruupiah)

Tahun	Total Penerimaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2016	77.111.297	17.728.179	43.277.778	16.105.340
2017	83.436.351	22.439.986	43.451.828	17.544.536
2018	86.742.131	20.597.125	45.054.255	21.090.750
2019	95.284.322	23.246.080	47.486.402	24.551.839

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah penulis)

Besar perolehan rata-rata PAD dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2019 adalah sebesar Rp20,9 triliun atau hanya berkontribusi sebesar 24,5% dari TPD-nya. Untuk lebih rinci, berikut adalah data perolehan PAD dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang telah diakumulasi dari tahun 2016-2019 dan sudah diurutkan dari daerah dengan perolehan PAD tertinggi sampai terendah (dalam jutaan rupiah):



Sumber: Data BPS Jawa Barat (diolah penulis)

Gambar 1.1

Akumulasi PAD Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 2016-2019

Berdasarkan data di atas, daerah yang memiliki akumulasi PAD tertinggi sejak 2016-2019 yaitu Kabupaten Bogor dengan total PAD Rp10,5 Triliun, sedangkan daerah dengan perolehan PAD terendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan total PAD Rp440 Milyar. Sebaran perolehan PAD di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat masih belum merata dimana hanya ada 2 (dua) daerah saja yang memiliki akumulasi PAD di atas Rp10 Triliun dalam 4 tahun yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bandung, sedangkan rata-rata akumulasi perolehan PAD di daerah lain hanya sebesar Rp1 Triliun saja.

Berdasarkan data tersebut, kebanyakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih bergantung terhadap penerimaan dana transfer dari pemerintah di atasnya dengan rata-rata dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dalam periode 2016-2019 adalah sebesar Rp44,8 triliun atau sebesar 52,4% dari TPD-nya. Besarnya penerimaan dana perimbangan di kebanyakan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total perolehan PAD yang merupakan hasil pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih terbilang rendah ditengah Jawa Barat merupakan salah satu dari 4 provinsi di Indonesia yang memiliki kontribusi PAD lebih dari 60% dari TPD-nya.

Rendahnya rata-rata perolehan PAD di kabupaten dan kota di Jawa Barat bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakmerataan potensi dan sumber kekayaan yang dimiliki setiap daerah, kualitas SDM pengelola dan akses fasilitas yang dimiliki daerah untuk mengoptimalkan semua kekayaan potensial di

daerahnya sehingga beberapa daerah sulit untuk menyeimbangkan jumlah PAD yang diperoleh. Maka dari itu perlu adanya strategi yang tepat dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menggali semua potensi yang ada sehingga kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat bisa tumbuh secara merata. Mardiasmo (2002:25) menjelaskan bahwa, masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat dituntut untuk mengoptimalkan segala potensi kekayaan yang ada. Besarnya perolehan PAD di suatu daerah salah satunya ditunjang oleh bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat luas sehingga masyarakat akan lebih senang hati untuk memenuhi kewajiban mereka sebab, masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas sarana pelayanan publik tidak mengalami peningkatan (Datu, 2012).

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD diantaranya adalah melalui investasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi (bunga, dividen, dan royalti) atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah dapat berupa penyaluran dana bergulir, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), penyertaan modal daerah, atau bentuk investasi lainnya yang diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect*, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan dasar pengenaan sumber PAD sesuai dengan teori Pertumbuhan Ekonomi yang disampaikan oleh Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa investasi dapat menciptakan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa, dan akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat sehingga pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan sumber penerimaan yang dimiliki daerah.

Hal ini diperkuat melalui hasil penelitian Lastri Putri BR Sijabat, Raisa Yamani, Ahmad Albar Tanjung, dan Sukardi (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Investasi Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang” yang menunjukkan bahwa investasi daerah dalam jangka panjang berpengaruh positif secara signifikan terhadap PAD.

Namun, berdasarkan penelitian dari Agus Indriatno Kurniawan, Theresia Militina, dan Rachmad Budi Suharto (2017) dengan judul “Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli

Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi” menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh langsung tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Syaifuddin Jihansyah, dan Ni Nyoman Yuliarmi (2019) dengan judul “Pengaruh Investasi, Tingkat Hunian dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” juga menunjukkan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi Bali.

Berdasarkan kajian tersebut, perbedaan ruang lingkup investasi dan daerah pelaksanaan investasi bisa jadi menghasilkan pengaruh yang berbeda dari investasi terhadap PAD. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) dari variabel investasi yang bisa dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan ruang lingkup investasi yang berbeda. Selain itu, mengacu pada teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar investasi pada gilirannya akan memberikan efek Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka panjang yang akan memperluas dasar pengenaan sumber PAD.

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah serta mendorong sektor-sektor unggulan daerah, seperti industri, perdagangan, dan jasa, untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Sejalan dengan analisis Harrod dalam teorinya yang mengemukakan tentang *instability theorem* dimana dalam proses Pertumbuhan Ekonomi melekat secara *inheren* ketidakstabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kondisi ekuilibrium

sehingga diperlukan intervensi kebijaksanaan negara untuk menanggulangi gangguan ketidakstabilan yang melekat dalam pertumbuhan itu sendiri, maka pemerintah dianggap perlu ikut andil dengan memberikan insentif dan subsidi kepada bisnis sektor swasta untuk memotivasi bisnis dalam melakukan pengembangan dan inovasi yang akan menjadi stimulus Pertumbuhan Ekonomi untuk mencapai inovasi dalam produksi.

Hal ini diperkuat melalui penelitian dari Gading Chandradiandi dan Khirstina Curry (2024) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Belanja Modal Dan Indeks Gini Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2013-2020”. Yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD. Selain itu, Penelitian dari Muhammad Syahroni, dan Oryza Ardhiarisca (2023) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap PAD pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021 dan penelitian dari Risna Wati Sirait (2019) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin” juga menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Namun, dari penelitian terdahulu masih belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Selain itu, penelitian yang menggabungkan variabel investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam menganalisis pengaruhnya terhadap PAD pun belum

dilakukan. Maka dari itu, penting untuk membuktikan analisis teori Harrod-Domar mengenai dampak investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis pengaruh dari investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul **“Pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Periode 2019-2023)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lain yang sejenis dalam upaya meningkatkan PAD melalui pengoptimalan investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Investasi Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023
2. Bagaimana pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara parsial
3. Bagaimana pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Investasi Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi sektor publik secara umum dan dapat melakukan penelitian yang mendalam pada permasalahan yang bersangkutan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber literatur dalam proses pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang bersangkutan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi investasi serta peran Pertumbuhan Ekonomi.

d. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman pembaca mengenai pengaruh dari Investasi Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat periode 2019-2023 yang tercatat di berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik Jawa Barat (<https://jabar.bps.go.id>), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing daerah.

1.5.2 Waktu Penelitian

Demi mewujudkan penelitian yang efektif dan efisien, maka peneliti menyusun waktu penelitian selama terhitung dari bulan September 2024 dan direncanakan sampai dengan bulan Juli 2025.